

**DUKUNGAN DUNIA USAHA TERHADAP SUSTAINABILITY  
EVELOPMENT DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM  
MASA PANDEMI COVID 19 DI SUMATERA UTARA**

**Haikal Rahman**

Universitas Negeri Medan  
Fakultas Ekonomi Jl. Willem Iskandar pasar V Medan Estate  
Email: haikalrahman@unimed.in

**Indra Maipita**

Universitas Negeri Medan  
Email: imaipita@gmail.com

**Azizul Kholis\***

Universitas Negeri Medan  
Email: azizulkholis@unimed.ac.id

**Abstrak**

*Studi skala kecil (Micro Research) ini membahas kondisi pembangunan berkelanjutan dan peranan tanggung jawab sosial perusahaan dalam masa pandemic Covid 19 di Sumatera Utara. Dengan menggunakan teori pembangunan berkelanjutan dan menggunakan teknik snapshot survey analisis data sekunder yang bersumber dari media massa serta melalui survey online kepada perusahaan yang bernaung di KADIN dan Asosiasi pelaku usaha lainnya di Sumatera Utara, studi ini bertujuan memperoleh informasi tentang pembanguna berkelanjutan dan CSR. Data diuraikan secara deskriptif dan didapatkan kesimpulan bahwa banyak perusahaan yang berkomitmen melaksanakan CSR nya agar aktifitas social tetap dilaksanakan dan aktifitas ekonomi tetap berjalan. Pada aspek lingkungan perusahaan menyikapi pandemi Covid-19 dengan mematuhi regulasi pemerintah khususnya protocol kesehatan dan menjaga kebersihan lingkungan dan berusaha meningkatkan kinerja sosialnya. Perusahaan juga berusaha secara maksimal mendukung Pembangunan berkelanjutan dengan tetap melaksanakan aktifitas bisnis sesuai ketentuan protocol kesehatan yang berlaku. Keterbatasan studi ini adalah pada sampel yang relatif kecil dan tidak melakukan analisis komprehensif secara kuantitatif dengan membuat secara detil indikator variabel yang diukur. Hal ini dikarenakan keterbatasan kondisi akses data pada masa pandemi Covid 19. Saran untuk penelitian lanjutan dapat merinci variable yang dapat diukur secara kuantitatif dengan alat analisis yang lebih sesuai. Rekomendasi kebijakan studi ini adalah perlunya penguatan pemda dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mendorong peningkatan kinerja sosial melalui penguatan aktifitas CSR.*

**Kata Kunci : Pembangunan, berkelanjutan, CSR**



Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sebagai kebijakan untuk membatasi pergerakan orang dan barang. Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 dan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2020. Pandemi Covid-19 yang dihadapi bangsa Indonesia merupakan suatu bencana besar yang sedang dihadapi. Sejak *World Health Organization (WHO)* menetapkan *Covid-19* sebagai pandemi pada 11 Maret 2020, seluruh negara termasuk Indonesia telah menerapkan berbagai upaya pencegahan dan penanganan khusus. Dampak covid ini hampir meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Berkenaan dengan pembangunan berkelanjutan secara nyata Covid berdampak terhadap Ekonomi, Lingkungan dan Sosial. Menurut Balwind (2020) Dampak terhadap aktifitas ekonomi setidaknya terlihat pada tabel 1 berikut:

**Table 1.** Large Economies and COVID-19

	GDP	Manufacturing	Exports	Manufactured exports
US	24%	16%	8%	8%
China	16%	29%	13%	18%
Japan	6%	8%	4%	5%
Germany	5%	6%	8%	10%
UK	3%	2%	2%	3%
France	3%	2%	3%	4%
India	3%	3%	2%	2%
Italy	2%	2%	3%	3%
Brazil	2%	1%	1%	1%
Canada	2%	0%	2%	2%

Sources: World Bank World DataBank, FT COVID dashboard  
 (<https://www.ft.com/content/a26fbf7e-48f8-11ea-aeb3-955839e06441>)

Jika negara negara yang menjadi poros ekonomi dunia telah mengalami dampak covid terhadap aktifitas ekonominya, sudah pasti Indonesia juga akan mengalami hal yang sama. Walaupun dalam jangka panjang setelah krisis Covid-19 bisa diatasi maka kondisi perekonomian akan dapat dipulihkan. Masa pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) yang terjadi saat ini mengakibatkan pemerintah harus menyesuaikan kondisi negara dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2020 yang digelar di Jakarta menyampaikan, fokus RKP tahun 2021 adalah pemulihan sosial ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Secara khusus Provinsi Sumatera Utara termasuk daerah yang risiko tinggi terjadinya bencana, sebab berdasarkan hasil kajian BPBD Provsu (2018), di Sumut terdapat 12 jenis bencana seperti gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor, angin puting beliung, gunung api, tsunami dan lain-lain. Sebagian besar kabupaten/kota se Sumut juga termasuk dalam 136 kabupaten/kota di Indonesia yang kawasan rawan bencana. Dengan

memperhatikan persoalan Ekonomi, lingkungan dan social secara umum maka studi ini mengajukan sebuah rumusan masalah:

1. Bagaimanakah dukungan dunia usaha terhadap pembangunan berkelanjutan dalam masa pandemi Covid-19
2. Bagaimanakah tanggungjawab social perusahaan dalam masa pandemi Covid-19

Dengan adanya studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang keberlanjutan ekonomi, social dan lingkungan di tengah era pandemic covid 19 khususnya di Provinsi Sumatera Utara.

## LANDASAN TEORITIS

Iqbal dan Sofyan (2012) menjelaskan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan menuntut korporasi, dalam menjalankan usahanya, untuk turut memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut: 1. Ketersediaan dana; 2. Misi lingkungan; 3. Tanggung jawab sosial; 4. Terimplementasi dalam kebijakan (masyarakat, korporat, dan pemerintah); 5. Mempunyai nilai keuntungan/manfaat). Teori yang paling relevan dengan pembangunan berkelanjutan adalah dan tanggungjawab social perusahaan adalah teori stakeholder. Stakeholders yang biasa diartikan sebagai pemangku kepentingan adalah pihak atau kelompok yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap eksistensi atau aktivitas perusahaan, dan karenanya kelompok tersebut mempengaruhi dan/ atau dipengaruhi oleh perusahaan. Definisi lain dilontarkan oleh Rhenald Kasali sebagaimana dikutip oleh Yusuf Wibisono, yang menyatakan bahwa yang dimaksud para pihak adalah setiap kelompok yang berada di dalam maupun di luar perusahaan yang mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan perusahaan (Kirana, 2009).

Teori Stakeholder menyatakan bahwa dunia bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholder-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, dan pihak lain). Gary et.al. (dalam Ghozali dan Chariri, 2007) menyatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder dan dukungan tersebut harus dicari, sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Makin powerful stakeholder, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antar perusahaan dengan stakeholdernya. Stakeholder dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan posisi, prioritas, dan aktivitasnya.

Kirana (2009), membagi stakeholders menjadi sebagai berikut: 1. Stakeholders internal dan stakeholders eksternal Stakeholders internal adalah stakeholders yang berada di dalam lingkungan organisasi. Misalnya karyawan, manajer, dan pemegang saham (shareholder), sedangkan stakeholders eksternal adalah stakeholders yang berada diluar lingkungan organisasi seperti penyalur atau pemasok, konsumen atau pelanggan, masyarakat, pemerintah, pers, dsb. 2. Stakeholders primer, stakeholders sekunder dan stakeholders marjinal Dalam hal ini stakeholders yang paling penting disebut stakeholders primer dan stakeholders yang kurang penting disebut stakeholders sekunder, sedangkan yang biasa diabaikan disebut stakeholders marjinal. Urutan prioritas ini bagi setiap perusahaan berbeda-beda, meskipun produk atau jasanya sama dan bisa berubah-ubah dari

waktu ke waktu 3. Stakeholders tradisional dan stakeholders masa depan Karyawan dan konsumen dapat disebut sebagai stakeholders tradisional.

Saat ini sudah berhubungan dengan organisasi, sedangkan stakeholders masa depan adalah stakeholders pada masa yang akan datang diperkirakan akan memberikan pengaruhnya pada organisasi seperti mahasiswa, peneliti, dan konsumen potensial 4. Proponents, opponents, dan uncommitted (pendukung, penentang, dan yang tidak peduli) Di antara stakeholders ada kelompok yang memihak organisasi (proponents), menentang organisasi (opponents) dan yang tidak peduli atau abai (uncommitted). Dalam hal ini, organisasi perlu untuk mengenai stakeholders yang berbeda-beda ini, agar dengan jernih dapat melihat permasalahan, menyusun rencana dan strategi untuk melakukan tindakan yang proporsional. 5. Silent majority dan vocal minority (pasif dan aktif). Dilihat dari aktivitas stakeholders dalam melakukan complain atau mendukung perusahaan, tentu ada yang menyatakan penentangan atau dukungannya secara vokal (aktif) namun ada pula yang menyatakan secara silent (pasif).

Program CSR adalah sebuah investasi dari perusahaan perusahaan untuk pertumbuhan dan keberlanjutan (sustainability) perusahaan dan tidak hanya dilihat sebagai sarana mencari keuntungan/biaya (cost centre) melainkan sebagai sarana mencapai keuntungan (profit centre). Program CSR merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Dalam konsep CSR yang menggunakan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) masuk pada ethical theory, karena menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menjawab kebutuhan di masa kini tanpa mengancam kemampuan untuk melindungi generasi penerus untuk memenuhi kebutuhannya.

Dengan penerapan program CSR pada konsep sustainable development dalam perusahaan, maka akan memudahkan bisnis dalam sebuah perusahaan guna mengimplementasikan program-program untuk dimasukkan sebagai bagian strategi bisnis. Hal ini juga guna untuk pertumbuhan dan pembangunan keberlanjutan untuk kesejahteraan.

## **METODE**

Studi ini adalah riset skala kecil dengan teknik snapshot survey untuk mendapatkan gambaran singkat dari sebuah fenomena yang terjadi. Dengan menggunakan survey online kepada perusahaan yang tergabung dalam KADINSU dan AKSI serta mengumpulkan berbagai data dan informasi terkait program CSR perusahaan selama pandemi Covid 19 di Sumatera Utara yang bersumber dari media massa baik cetak maupun online, maka dapat diuraikan secara analisis deskriptif tentang peran perusahaan dalam menyalurkan CSR untuk penguatan dunia usaha mendukung aktifitas Ekonomi, lingkungan dan sosial sebagai pilar penting dari ekonomi berkelanjutan. Setelah data dan informasi ditabulasi maka dibahas secara singkat dan dibandingkan dengan beberapa studi relevan untuk diambil kesimpulan dan rekomendasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Khusus untuk penanganan Covid-19 Pemprovsumut telah mengalokasikan anggaran melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bidang kesehatan dan non kesehatan. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1 (satu) berikut :

**Tabel 1.** *Re-Focusing* APBD Sumut untuk Covid-19

No	Organisasi Perangkat daerah	Jumlah	Keterangan
1	BPBD	Rp. 32 Milyar	Non kesehatan
2	Dinas kesehatan	Rp. 199 Milyar	Kesehatan
	Jumlah	Rp. 231 Milyar	

Sumber :Gugus Tugas Pemprovsumut, 2020

Dana pada tabel 1 (satu) tersebut diatas bersumber dari *Refocusing* APBD tahun 2020 yang dilakukan oleh Pemprov Sumut. Dana telah disalurkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rp 32 M lebih dan kepada Dinas Kesehatan sebesar Rp199 M. Alokasi ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya membiayai fungsi kesehatan dan non kesehatan yang digunakan oleh GTPP. Secara total, Pemprov Sumut juga sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,5 triliun lebih untuk penanggulangan Covid-19. Dana tersebut dialokasikan ke dalam 3 tahap. Pada tahap pertama dialokasikan anggaran sebesar Rp502 M, tahap kedua Rp500 M dan tahap ketiga Rp 500 M. Alokasi anggaran tersebut berdampak pada efisiensi belanja kepada kegiatan yang sifatnya rutin, misalnya untuk rapat, pertemuan, kegiatan sosialisasi, termasuk juga perjalanan dinas. Selain kesehatan, Covid-19 juga berdampak pada sosial dan ekonomi masyarakat. Pemprov Sumut telah menyiapkan anggaran untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS). Bantuan ini akan diberikan kepada 150 ribu kepala keluarga dengan penerimaan Rp600 ribu per bulan.

Menurut Ismael (2020) pemprovsumut akan membuat tahapan penggunaan anggaran sebesar Rp270 M. “Kemudian ada juga bantuan bahan pangan dari GTPP sekitar Rp30 M, sehingga total Rp 300 M. Namun beberapa kendala dalam pengelolaan dana bencana adalah (1) keterbatasan anggaran, (2) aturan pengelolaan anggaran, dan (3) pertanggungjawaban anggaran. Pemerintah biasanya tidak dapat mengalihkan suatu anggaran tanpa melalui mekanisme yang sudah diatur dalam sebuah regulasi, seperti Peraturan Menteri keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pengelolaan APBD. Padahal dalam situasi darurat sangat diperlukan percepatan kegiatan sehingga keterbatasan anggaran, harus dapat dicarikan solusinya. Berdasarkan fakta tersebut diatas jelas dapat dinyatakan keterbatasan anggaran penanggulangan bencana yang dialami oleh pemerintah daerah harus dicarikan jalan keluarnya, misalnya melibatkan pihak swasta ataupun masyarakat untuk menyumbang dana untuk membantu meringankan beban anggaran Pemerintah Daerah.

Salah satu potensi dana yang dapat membantu untuk dana bencana adalah anggaran *Corporate Social Responsibility (CSR)* perusahaan Badan Usaha milik Negara (BUMN). Potensi dana CSR perusahaan di Sumatera Utara sangat besar karena terdapat hampir 50 perusahaan BUMN yang beroperasi di Sumatera Utara dan terdapat 5 (lima) BUMN yang langsung berkantor pusat daerah ini yaitu PT. Inalum, PT. Pelindo I, PT. Perkebunan Nusantara, 2 (dua), PTPN 3 (tiga) dan PTPN 4 (empat), selebihnya berkantor pusat di Jakarta tetapi memiliki perwakilan atau cabang di Sumatera Utara. Potensi anggaran CSR perusahaan BUMN sangat memungkinkan untuk membantu dana bencana karena saat ini

setidaknya terdapat 7 (tujuh) regulasi terkait tanggungjawab sosial perusahaan baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun Peraturan Menteri. Regulasi pada tingkat Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/Kota juga telah banyak diterbitkan berupa Perda ataupun pergub CSR. Setidaknya lebih dari 50 Kab/ Kota di Indonesia telah Menerbitkan Perda CSR, namun sangat disayangkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum memiliki Perda ataupun pergub CSR.

Demikian juga dengan 33 Kabupaten Kota Se-Sumut, semuanya belum memiliki regulasi terkait CSR didaerahnya masing-masing, padahal potensinya sangat besar khususnya membantu kegiatan kebencanaan. Sebagai fakta Berbagai cara dilakukan Pertamina untuk membantu berbagai lapisan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggulirkan Program Kemitraan sebesar Rp100 miliar bagi 1.000 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di beberapa wilayah Indonesia, di antaranya Riau, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Bali, NTB, dan Kalimantan Barat. Kemudian sebagai wujud komitmennya dalam mencegah penyebaran COVID-19 dan membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi tersebut, Satgas COVID-19 BUMN Sumut dengan kantor Cabang PT Angkasa Pura II (Persero) Bandar Udara Internasional Kualanamu sebagai koordinator menyalurkan bantuan sosial berupa sembako. Bantuan tersebut berupa bahan pokok minyak makan sebanyak 650 liter yang diserahkan kepada Polda Sumut untuk di bagikan kepada masyarakat sekitar Sumut yang berdampak pada masa pandemi virus COVID-19. Hasil penelitian Rangga Prihadi Ekawahyu 2008, menunjukkan bahwa kinerja sosial perusahaan swasta dan BUMN tahun 2006 dan 2008 berbeda secara signifikan. Selain itu, tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara perubahan kinerja sosial perusahaan BUMN dan swasta terhadap kinerja keuangan perusahaan. Rizky Isnaeny, 2018 Selanjutnya ditemukan bahwa kinerja keuangan juga berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja sosial perusahaan, hal ini sesuai dengan slack resources theory.

Penelitian mengenai kinerja sosial perusahaan BUMN di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa orang. Fauzi et. al (2009) menggunakan data dari tahun 2001-2004 dan menggunakan KLD sebagai standar penilaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja sosial perusahaan Swasta dan BUMN tidak berbeda secara signifikan. Hasil yang berbeda didapatkan oleh Mulia (2010), penelitian yang menggunakan data annual report perusahaan manufaktur tahun 2008 yang menggunakan standar dari GRI tersebut menghasilkan adanya perbedaan secara signifikan antara perusahaan Swasta dan BUMN di Indonesia.

Selain perusahaan BUMN beberapa perusahaan swasta nasional juga turut berperan aktif dalam menyalurkan dana CSR nya kepada gugus tugas Covid 19 Sumatera Utara maupun kabupaten Kota. Secara keseluruhan, sampai saat ini Asian Agri Wilayah Sumatera Utara telah membagikan 180 ember kran, 180 handsoap dan isi ulangnya, 7.500 masker kain, 64 baliho dan poster tentang COVID-19 serta penyemprotan disinfektan rutin di setiap desa atau kelurahan. Salahsatu anak perusahaan Asian Agri Group yang turut memberikan partisipasi dalam mencegah penyebaran COVID-19 adalah PT Nusa Pusaka Kencana (PT NPK) yang terletak di Desa Bahilang, Kec Tebing Syahbandar, Kab Serdangbedagai. Bantuan yang diberikan berupa masker 1.000 pcs, alat semprot 4 unit, ember kran air lengkap dengan sabunnya 20 buah, poster imbauan 20 lembar, penyemprotan disinfektan secara berkala. Total besaran dana bantuan yang sudah diterima Tim Gugus Tugas penanganan Covid 19 di tingkat Provinsi Sumatera utara adalah sampai tanggal bulan Juni 2020 adalah Rp. 550.000.000 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Berdsarakan sekilas data-data diatas

dapat di simpulkan bahwa aktifitas sosial dengan program CSR untuk memperkuat kegiatan ekonomi, sosial dan lingkungan telah berjalan di Provinsi Sumatera Utara pada masa pandemic Covid ini.

Selanjutnya, atas analisis sosial budaya dan karakteristik masyarakat, disimpulkan bahwa himbauan *Social Distancing* atau *physical distancing* tidak akan efektif mencegah penyebaran Covid-19 di Sumatera Utara. Dibutuhkan kebijakan dalam tataran regulasi yang lebih terukur dan sistematis. Sedangkan dalam analisis terhadap aspek politik dan keamanan, kajian tersebut melihat bahwa ancaman sesungguhnya dari pandemic covid-19 dan penanganannya bagi stabilitas dan kondusifitas politik dan keamanan di Sumatera Utara adalah munculnya kepanikan, stigma sosial dan kesenjangan informasi (hoaks) di tengah masyarakat. Sehingga diperlukan upaya penyeimbangan informasi dan peningkatan pengetahuan masyarakat terkait Covid-19, melalui manajemen informasi dan edukasi yang baik.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dukungan dunia usaha terhadap pembangunan berkelanjutan dalam masa pandemi Covid-19 sangat baik dibuktikan dari komitmen perusahaan terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial di Provinsi Sumatera Utara
2. Tanggungjawab sosial perusahaan melalui program CSR dalam masa pandemi Covid-19 sangat membantu secara sosial dan lingkungan sangat membantu dan memiliki dampak memperkuat pembangunan berkelanjutan.

Keterbatasan studi ini adalah pada sampel yang relatif kecil dan tidak melakukan analisis komprehensif secara kuantitatif dengan membuat secara detil indikator variabel yang diukur. Hal ini dikarenakan keterbatasan kondisi akses data pada masa pandemi Covid 19. Saran untuk penelitian lanjutan dapat merinci variable yang dapat diukur secara kuantitatif dengan alat analisis yang lebih sesuai. Rekomendasi kebijakan studi ini adalah perlunya penguatan pemda dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mendorong peningkatan kinerja sosial melalui penguatan aktifitas CSR.

## DAFTAR PUSTAKA :

- Afdal Kurnia, Amanda Shaura, Santoso Tri Raharjo, Risna Resnawaty, 2019 Sustainable Development Dan Csr, Proseding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 
- Eduardus, E. dan Juniarti. 2016. —Kinerja Sosial Perusahaan dan Kinerja Keuangan Perusahaan yang Diukur Menggunakan Tobin's q||. Business Accounting Review Vol. 4, No. 1.
- Fadila, Oktaviani Nur. 2016. —Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Profitabilitas dan Likuiditas Pada Perusahaan Tobacco Manufactures||. Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen. Vol. 5, No. 7
- Fauzi, Hasan, Azhar A. Rahman, Mostaq Hussain, Adnan A. Priyanto 2009. Corporate Sosial Performance of Indonesian State-Owned and Private Companies. Journal of Accounting Research.



- Fauzi, Hasan (2007). Institutional Ownership and Corporate Sosial Performance: Empirical Evidence from Indonesian Companies. Issues in Sosial and Environmental Accounting. Vol.1 hal 337 dan 340
- Fauzi, Hasan (2008). Corporate Sosial and Environmental Performance: A Comparative Study of Indonesian Companies and Multinational Companies (MNCs) Operating in Indonesia. Journal of Knowledge Globalization, Vol. I hal 84
- Hirigoyen, G., dan Poulain-Rehm, T. 2015. –Relationships between Corporate Social Responsibility and Financial Performance: What is the Causality?". Journal of Business & Management. Vol. 4, Issue
- Lina Maulidiana, 2018, Pengaturan Csr Menuju Pembangunan Berkelanjutan Penerbit AURA CV. Anugrah Utama Raharja Anggota IKAPI No.003/LPU/2013 x + 73 hal : 15 x 23 cm Cetakan, Januari 2018 ISBN: 978-602-5636-2303
- Nurhadi, 2011, Interaksi Tanggungjawab Sosial, Ktnerja Sosial, Kinerja Keuangan Dan Luas Pengungkapan Sosial (Uji Motif di Balik Social Responsibility Perusahaan Go publik di Indonesia) Oleh : Nor Hadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negri KUDUS <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/MAX/article/view/247/257>
- Putnam, David, 2012. ISO 14031: Environtmental Performance Evaluation; Draft Submitted to Confederation of Indian Industry, Journal, Sepetmber
- Rangga Prihadi Ekawahyu , 2008, Perubahan Kinerja Sosial Perusahaan BumN Dan Swasta Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan, <http://eprints.undip.ac.id/26821/1/resume.pdf>
- Reid, S. F. (2016). *The importance of scientific method* [Unpublished manuscript], BSC100:
- Rizky Isnaeni, 2018, Pengaruh Kinerja Sosial Dan Kinerja Keuangan Perusahaan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2013-2016), FEB, UNILA
- Trihandayani Amaliah Akuntansi Sosial Dan Pengukuran Kinerja Sosial (Suatu bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan) <file:///C:/Users/lab%20komputer%20FE/Downloads>
- Twigg, J, 2007. Characteristics of a Disaster-Resilient Community: A Guidance Note. Disaster Risk Reduction Interagency Coordination Group, DFID. 95.Twigg, J. (2015). Disaster risk reduction. Good Practice Review 9. London: Humanitarian Practice Network
- World Health Organization, 2003. "Severe acute respiratory syndrome (SARS): Status of the outbreak and lessons for the immediate future", Geneva
- World Health Organization, 2009. "Pandemi influenza preparedness and response: a WHO guidance document", Geneva.
- World Health Organization, 2013. A Systematic Review of Public Health Emergency Operations Centres (EOC). World Health Organization.WHO/HSE/GCR/2014.1. Retrieved from: [http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/99043/1/WHO\\_HSE\\_GCR\\_2014.1\\_eng.pdf119](http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/99043/1/WHO_HSE_GCR_2014.1_eng.pdf119).
- World Health Organization, 2016. "WHO MERS-CoV Global Summary and risk assessment", Geneva.

Weber, Olaf. 2017. –Corporate sustainability and financial performance of Chinese banks||. Sustainability Accounting, Management and Policy Journal. Vol 8, Issue 3.

Akses Internet:

<http://iaiglobal.or.id/v03/berita-kegiatan/detailberita-1284-checklist-entitas-bisnis-di-tengah-pandemi-covid19>

<https://www.sumutprov.go.id/artikel/artikel/pasca-pandemi-covid19-pemprov-sumut-fokus-pulihkan-ekonomi>

<https://www.pertamina.com/Media/File/Energia-Weekly-18-Mei-2020.pdf>

<https://sumut.antaranews.com/berita/295224/satgas-covid-19-bumn-sumut-salurkan-bantuan-sembako>

